# Pemerintah Provinsi Lampung

# Evaluasi Rencana Aksi

## TAHUN ANGGARAN 2024

**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**

*Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124*

*Bandar Lampung*

Web : koperasiukm.lampungprov.go.id

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019-2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,

**Drs. SAMSURIJAL, M.M.**
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003



Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iii

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi ..... 1

1.1.2 Sumber daya Manusia ..... 5

1.1.3 Struktur Organisasi ..... 6

1.2 MaksudanTujuan ..... 7

1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi ..... 7

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....7

1.3 Ruang Lingkup ..... 7

BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024 ..... 8

2.1 Visi dan Misi ..... 8

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 10

3.1 Tujuan ..... 10

3.2 Program dan Kegiatan ..... 12

BAB IV. PENUTUP ..... 15

LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI .....16

# BAB. I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

### 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gebernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;

b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;

c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;

d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;

e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;

f. Pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;

g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;

h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;

i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;

j. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;

k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;

l. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan;
2. Untuk meyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
   a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
   b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;

c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undanganserta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. Perencanaan dan program;
   b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
   c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
   d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
   e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
   f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
   h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

❖ Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

1) Penelaah Teknis Kebijakan;
2) Pengolah Data dan Informasi;
3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

1) Penelaah Teknis Kebijakan;
2) Pengolah Data dan Informasi;
3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

1) Penelaah Teknis Kebijakan;
2) Pengolah Data dan Informasi;
3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

1) Penelaah Teknis Kebijakan;
2) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Penyelenggara;
3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

❖ UPTD PLUT, membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
3) Seksi Pelayanan Usaha;

❖ Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :

1) Analis Kebijakan
2) Analis Hukum
3) Widyaiswara
4) Pengawas Koperasi
5) Pranata Komputer
6) Perencana
7) Arsiparis
8) Analis Keuangan
9) Pranata SDM
10) Pengembang Kewirausahaan

### 1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :

**Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan**

| JUMLAH PEGAWAI | KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM | PANGKAT/GOL | JUMLAH PEJABAT | |
|---|---|---|---|---|
| | | | STRUKTURAL | FUNGSIONAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PNS : 75 | S3 : - | IV/e : - | Ess IV = 8 | Widya Iswara. = 1 org |
| PTHL : 8 | S2 : 28 | IV/d : 1 | Ess III = 7 | Pengawas Koperasi = 6 org |
| | S1 : 44 | IV/c : 2 | Ess II = 1 | Perencana = 2 org |
| | D4 : - | IV/b : 5 | | Fungsional lainnya = 17 org |
| | D3 : 1 | IV/a : 16 | | |
| | D2 : - | III/d 32 | | |
| | D1 : - | III/c : 10 | | |
| | SLTA : 13 | III/b : 8 | | |
| | SLTP : - | III/a : 5 | | |
| | SD : - | II/d : - | | |
| | | II/c : 4 | | |
| | | II/b : 2 | | |
| | | II/a : 2 | | |
| | | I/d : - | | |
| | | I/c : - | | |
| | | I/b : - | | |
| | | I/a : - | | |
| Jumlah PNS | PNS : 75 | | | |

### *1.1.3 Struktur Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

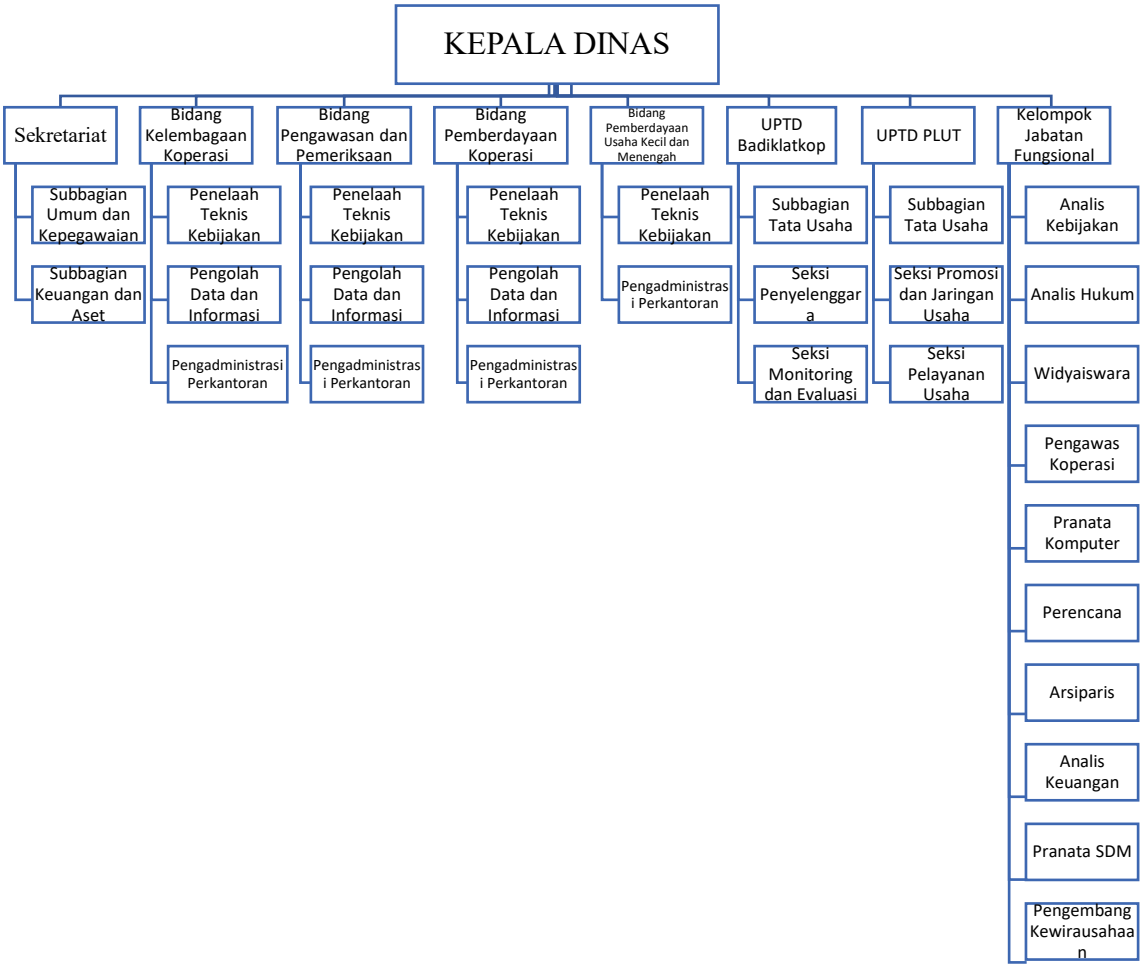

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

### 1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### *1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi*

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## 1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

# BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024

## 2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholdersagar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :**"*RAKYAT LAMPUNG BERJAYA*".** Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024,dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religiusdan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" unruk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi *(pro growth)* melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi *(pro investment)* diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengganggguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

# BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024) | SATUAN |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi | 1 Persentase Koperasi Modern | 36,18 | Persen |
| | | 2 Persentase UMKM Naik Kelas | 8,38 | Persen |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | SATUAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *9* |
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | 1 Persentase koperasi yang berkualitas | 33,54 | 34,26 | 35,22 | 36,18 | Persen |
| 2 | Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha | 1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) | 2,16 | 3,29 | 4,47 | 8,38 | Persen |

## 2.2 Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

**1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

a) Pelaksanaan Triwulan I

Melakukan pendampingan Koperasi Bumi Madu Mandiri Kab. Lampung Tengah.

b) Pelaksanaan Triwulan II

Menghadiri Kegiatan RAT Koperasi KSPSS Bola Dunia Jaya di Kab. Lampung Timur.

c) Pelaksanaan Triwulan III

Penyuluhan E- katalog dalam rangka peningkatan Jaringan Pemasaran ke Kab. Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang, Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat.

d) Pelaksanaan Triwulan IV

Penyuluhan Perkoperasian dengan jumlah peserta 35 orang

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

a) Pelaksanaan Triwulan I

Pembinaan / pendampingan rapat anggota tahunan koperasi di 17 Koperasi dan pelaksanaan kegiatan rakor rapat anggota tahunan koperasi dengan jumlah peserta 30 orang

b) Pelaksanaan Triwulan II

Pembinaan / pendampingan rapat anggota tahunan koperasi di 17 Koperasi dan pelaksanaan kegiatan rakor rapat anggota tahunan koperasi dengan jumlah peserta 30 orang

c) Pelaksanaan Triwulan III

Pembinaan / pendampingan rapat anggota tahunan koperasi di 17 Koperasi dan pelaksanaan kegiatan rakor rapat anggota tahunan koperasi dengan jumlah peserta 30 orang

d) Pelaksanaan Triwulan IV

Peningkatan Kapasitas SDM Pembina dan Pendamping Koperasi dengan jumlah peserta 50 orang

**2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat

a) Pelaksanaan Triwulan I

Pelaksanaan Bimtek Aplikasi Laporan Keuangan Berbasis Web.

b) Pelaksanaan Triwulan III

Bimtek Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan dan Kesinambungan Koperasi dan Pengawasan dan pemeriksaan koperasi ke koperasi kab/kota

- Subkegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel

a) Pelaksanaan Triwulan I

Pengawasan dan Pemeriksaan ke 7 Koperasi Kabupaten/Kota

b) Pelaksanaan Triwulan II

Pengawasan dan Pemeriksaan ke 18 Koperasi Kabupaten/ Kota

**3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

a) Pelaksanaan Triwulan III

Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi Laporan Keuangan berbasis web Angkatan I dan II

**4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

a) Pelaksanaan Triwulan I

Pelatihan Vocasional bidang Makanan dan Minuman, Pelatihan Pertanggungjawaban Pengurus/Pengawas dalam RAT Koperasi

b) Pelaksanaan Triwulan II

Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Pengawas Koperasi KSP/USP dan KSPPS/USPSS

c) Pelaksanaan Triwulan III

Pelatihan Vocational Kreasi Produk Kriya Kearifan Lokal (Membatik) bagi UMKM

**5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

a. Pelaksanaan Triwulan I

Kunjungan Lapangan ke koperasi Produsen Tambak Ruguk Makmur di Lampung Selatan

b. Pelaksanaan Triwulan II

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Bagi Pengurus Dan Pengelola Keuangan Koperasi.

c. Pelaksanaan Triwulan IV

Melaksanakan Pelatihan Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi Koperasi

**6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

a) Pelaksanaan Triwulan I

Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di kabupaten kota.

b) Pelaksanaan Triwulan II

Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha pengrajin batik baik pemasaran maupun pengembangan produk.

c) Pelaksanaan Triwulan IV

Melaksanakan Pelatihan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Bagi Koperasi dan Pelaku UMKM

- Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

a) Pelaksanaan Triwulan I

Terlaksananya pembinaan kepada pelaku usaha kuliner agar dapat meningkatkan sumber daya manusia wirausaha muda di Provinsi Lampung

b) Pelaksanaan Triwulan III

Memberikan pembinaan Kepada UMKM melalui pelatihan dan temu usaha terbagi dalam empat Angkatan.

**7. Program Pengembangan UMKM**

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

- Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

a) Pelaksanaan Triwulan II

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pembinaan dan Pendampingan UKM di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan, sebanyak 15 UMKM.

b) Pelaksanaan Triwulan III

Melaksanakan Pelatihan Promosi Produk.

c) Pelaksanaan Triwulan IV

Kegiatan Pelatihan Manajemen UKM

## EVALUASI RENCANA AKSI DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
## TAHUN 2024

| No | SASARAN | | | | | PROGRAM | | | | | KEGIATAN | | | | | AKSI | | JADWAL PELAKSANAAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | TW | TARGET/TW | REALISASI/TW | PROGRAM | INDIKATOR | TW | TARGET/TW | REALISASI/TW | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEG | TW | TARGET/TW | REALISASI /TW | AKSI KEGIATAN | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | Persentase koperasi yang berkualitas | 1 | 9,04% | - | PROGRAM PENURJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD | 1 | 25% | 25% | Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Keselarasan Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan | 1 | 3 Dok | - | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Dinas Koperasi dan UKM | v | v | v | v |
| | | | 2 | 18,09% | 18,19% | | | 2 | 50% | 50% | | | 2 | 5 Dok | 6 Dok | | | | | | |
| | | | 3 | 27,13% | 25,56% | | | 3 | 75% | 75% | | | 3 | 8 Dok | 8 Dok | | | | | | |
| | | | 4 | 36,18% | 43,05% | | | 4 | 100% | 100% | | | 4 | 10 Dok | 10 Dok | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja | 1 | 3 Lap | - | 1 | Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi triwulan I-IV dan Tahunan, Evaluasi Renja triwulan I-IV, Lakip dan LPPD-LKPJ | v | v | v | v |
| 2 | Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha | Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi) | 1 | 2,14% | - | | | | | | | | 2 | 5 Lap | 7 Lap | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 Lap | 9 Lap | | | | | | |
| | | | 2 | 4,28% | 4,31% | | | | | | | | 4 | 11 Lap | 11 Lap | | | | | | |
| | | | 3 | 6,43% | 8,38% | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | 4 | 8,57% | 8,38% | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah penyediaan gaji ASN | 1 | 73 orang | 73 orang | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 73 orang | 73 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 73 orang | 73 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 73 orang | 73 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 9 Dok | - | 1 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 18 Dok | 18 Dok | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 27 Dok | 27 Dok | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 36 Dok | 36 Dok | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | - | - | 1 | Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD TA 2022 | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 Lap | 1 Lap | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Penyusunan laporan keuangan/semesteran | 1 | 4 Lap | - | 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran BPKAD TA 2022 | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 Lap | 8 Lap | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 Lap | 12 Lap | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 17 Lap | 17 Lap | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 | 25% | 25% | | / | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Bulan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | - | - | 1 | Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 lap | 1 lap | | | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 lap | 1 lap | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 Lap | 2 Lap | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | - | - | 1 | Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 lap | 1 lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 lap | 1 lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 Lap | 2 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | 1 | 25% | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah layanan komponen instalasi listrik yang tersedia | 1 | - | - | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah layanan peralatan rumah tangga yang tersedia | 1 | - | - | 1 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah layanan barang cetakan yang tersedia | 1 | - | - | 1 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Material | Jumlah layanan bahan material yang tersedia | 1 | - | - | 1 | Penyediaan Bahan Material | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 paket | 2 paket | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Fasilitasi Kunjugan Tamu | Jumlah layanan kunjungan tamu | 1 | 3 Lap | - | 1 | Memfasilitasi Kunjugan Tamu | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 Lap | 6 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 Lap | 9 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 Lap | 12 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 1 | 3 Lap | - | 1 | Rapat Koordinasi/Konsultasi pada Dinas Koperasi & UKM | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 Lap | 6 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 9 Lap | 9 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 Lap | 12 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 1 | 25% | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1 | 3 Lap | - | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 6 Lap | 6 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 9 Lap | 9 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 12 Lap | 12 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Layanan jasa pelayanan umum kantor | 1 | 3 Lap | - | 1 | Honorarium PPTK, Operator Non PNS Perencanaan dan Keuangan, dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 6 Lap | 6 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 9 Lap | 9 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 12 Lap | 12 Lap | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan | 1 | - | - | 1 | Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | 2 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 1 | 2 unit | - | 1 | Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 4 unit | 5 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 6 unit | 7 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 9 Unit | 9 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan | 1 | 12 unit | - | 1 | Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 unit | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | 36 unit | 24 unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 47 Unit | 47 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | - | - | 1 | Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | 2 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | - | 1 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | | |
| | | | | | | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor** | 1 | - | - | **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas** | **Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha** | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | | | | **Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **Koperasi** | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 15,57% | 37,79% | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/koperasi yang diberi penyuluhan perkoperasian | 1 | 5 unit | - | 1 | Kegiatan Rapat Koordinasi dan updating data Koperasi serta penyuluhan Koperasi | v | v | v | v |
| | | | | | | | | 3 | 31,13% | 37,79% | | | 2 | 10 unit | - | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 46,7% | 44,84% | | | 3 | 15 unit | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 20 Unit | 20 Unit | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya** | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan izin pembentukan dan pembukaan cabang/kantor koperasi | 1 | 5 Unit Usaha | - | 1 | Rapat Koordinasi RAT, Fasilitasi akta pendirian Koperasi dan Peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi | v | v | v | v |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 10 Unit Usaha | 11 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 15 Unit Usaha | 11 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | 1 | - | - | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 15,72% | 36,96% | Penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi | Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan Tata Kelola kelembagaan Koperasi | 1 | 7 Unit Usaha | - | 1 | Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi | | v | | |
| | | | | | | | | 3 | 31,45% | 36,96% | | | 2 | 15 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 47,17% | 44,35% | | | 3 | 22 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** | **Persentase Koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan | 1 | 7 Unit Usaha | - | 1 | Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi | | v | v | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 15 Unit Usaha | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 22 Unit Usaha | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah** | 1 | - | - | **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi** | **Persentase Koperasi yang dinilai Kesehatannya** | 1 | 25% | 25% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 2 | 26,19% | 61,6% | Mengadakan Tingkat Kesehatan Koperasi | Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya | 1 | 7 Unit Usaha | - | 1 | Penilaian Kesehatan yang KSP/USP dan KSPPS/USPPS | | * | * | |
| | | | | | | | | | 3 | 52,38% | 61,6% | | | 2 | 15 Unit Usaha | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | 74,57% | 82,0% | | | 3 | 22 Unit Usaha | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEMEROPERASIAN | Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 | - | - | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya | 1 | 25% | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 8,85% | 12,85% | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah peserta pelatihan | 1 | 180 orang | - | 1 | Kegiatan Pendidikan dan Latihan bagi Koperasi dan UMKM sebanyak 27 angkatan | * | * | * | * |
| | | | | | | | | 3 | 17,7% | 20,85% | | | 2 | 360 orang | - | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 26,55% | 32,87% | | | 3 | 540 orang | 365 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 722 Orang | 722 Orang | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 | - | - | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitasi Pengembangan dan Perlindungan Usaha | 1 | 25% | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 7,86% | 11,04% | Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Koperasi yang meningkat baya omzet usaha Koperasi dari aspek kualitas dan kuantitas usaha, permodalan serta perlindungan usaha koperasi | 1 | 9 Unit Usaha | - | 1 | Kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Koperasi | * | * | | |
| | | | | | | | | 3 | 15,72% | 17,04% | | | 2 | 18 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 23,58% | 23,81% | | | 3 | 27 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 35 Unit Usaha | 35 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil | 1 | - | - | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para | Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan | 1 | 25% | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 | 0,17% | 0,28% | Memasyarakatkan kegiatan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penyerapan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah UMKM dan wirausaha pemula yang difasilitasi pengembangan usaha | 1 | 9 Unit Usaha | - | 1 | Pengumpulan dan Pengolahan Data UMKM serta menyusunkan produk UMKM unggul daerah | * | * | * | * |
| | | | | | | | | 3 | 0,33% | 0,56% | | | 2 | 18 Unit Usaha | 15 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 0,5% | 0,52% | | | 3 | 27 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 35 Unit Usaha | 35 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah UMKM dan wirausaha pemula yang difasilitasi Kapasitas dan Kompetensi SDM nya | 1 | 7 orang | - | 1 | Fasilitasi Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan wirausaha pemula yang | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 15 orang | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 22 orang | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 30 Orang | 30 Orang | | | | | | |
| | | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan | 1 | - | - | Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya | 1 | 25% | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | 75% | 75% | | | | | | |

Dipindai dengan CamScanner

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Usaha | | | | | | | 4 | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 3,64% | 7,20% | Pendidik dan Pengelolaan Pemasaran Bisnis Dapat Manfaat serta Dimasa dan Teknologi | Jumlah UMKM yang dibantuan pengembangan usahanya dari aspek pemasaran, produksi dan pemasaran serta jaringan usahanya | 1 | 22 Unit Usaha | | 1 | Kegiatan pelatihan pemasaran secara digital bagi UKM dan inovasi bagi UMKM di Kab/Kota | | * | | |
| | | | | | | | | | 2 | 7,27% | 8,00% | | | 2 | 44 Unit Usaha | 50 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 | 10,91% | 12,00% | | | 3 | 66 Unit Usaha | 60 Unit Usaha | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 | 80 Unit Usaha | 80 Unit Usaha | | | | | | |

Bandar Lampung, Januari 2025
KEPALA DINAS,

Dr. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP/19670418 198206 1 003

# BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu ***"Rakyat Lampung Berjaya".***

Bandar Lampung, Januari 2025

**KEPALA DINAS**
**KOPERASI DAN UKM**
**PROVINSI LAMPUNG,**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

**Drs. SAMSURIJAL, M.M.**
Pembina Utama Madya
NIP 19670418 199203 1 003



Dipindai dengan CamScanner